

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang luas, karena hal ini Indonesia disebut negara kepulauan. Saat ini Indonesia terdiri dari 37 provinsi. Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pembentukan daerah provinsi daerah kabupaten dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang (Azzahra, 2022).

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Hermawati, 2019)

Sistem pemerintahan Indonesia ini mempunyai pengawasan dalam keuangan dan kinerja yang salah satunya yaitu peranan audit yang sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi. Audit merupakan salah satu faktor yang ikut terlibat secara langsung dalam menjalankan kegiatan dalam instansi dan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Faustyana, 2018)

kinerja yang baik diperlukan audit kinerja atau sering dikenal dengan *performance* audit atau *value for money* audit merupakan jenis audit yang relatif baru dalam sektor publik. Selama ini, dalam sektor publik pengauditan yang dilakukan terbatas pada audit keuangan dan audit kepatuhan. Pengauditan keuangan dikonsentrasikan pada atestasi mengenai validitas dan kewajaran dan Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan (Ismet, 2018)

Pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kinerja suatu instansi informasi yang diberikan tidak hanya dari satu sisi saja namun juga mencakup unsur pembentuk kinerja yang lain. Pengukuran kinerja yang hanya berdasarkan segi keuangan seperti jumlah laba yang diperoleh tidaklah begitu cocok diterapkan pada organisasi sektor publik. Kinerja pada organisasi sektor publik juga menjadi gambaran akuntabilitas atas pertanggungjawaban seorang manajer publik. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja suatu organisasi sektor publik diperlukan pendekatan selain pendekatan keuangan yaitu pendekatan nonkeuangan sebagai ukuran kinerja (Dewi, 2020)

Dengan hal ini auditor yang independen dan berkompetensi memiliki peran penting untuk membantu instansi melakukan peningkatan dan evaluasi terhadap efektivitas proses pengelolaan risiko perusahaan, pengendalian, serta tata kelola perusahaan. Akan tetapi hingga saat ini peran auditor masih dimaknai secara konvensional yaitu hanya sebagai *watchdog* (Aprina, 2020)

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang mampu melaksanakan praktik *good governance* yaitu adanya fungsi audit. Untuk mewujudkan kinerja yang baik terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja instansi telah sesuai dengan standar yang

ditetapkan. pemeriksaan dapat mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola yang baik (Muhammad, 2019)

Selain itu auditor juga diharapkan mampu berperan sebagai katalisator untuk perusahaan. Katalis (*catalist*) memiliki arti suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi. Katalisator dimaksudkan untuk memberikan jasa kepada manajemen melalui saran- saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan, namun auditor tidak terlibat langsung pada aktivitas operasional perusahaan tersebut. Dalam konsep ini, pedoman merasakan kerjasama yang efektif dari tata kelola perusahaan dan internal audit meningkatkan kinerja, dan merupakan sumber keunggulan kompetitif dan membantu memenuhi tuntutan manajemen yang semakin kompleks saat ini. Terkait dengan itu, dapat diharapkan bahwa audit internal akan menjadi semakin berorientasi pada menasihati manajemen secara efisien tata kelola perusahaan (Padang, 2023)

Sistem pengendalian merupakan bagian dari praktik *good corporate governance* , antara lain mencakup, lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur, pengkajian, pengelolaan resiko usaha, aktivitas pengendalian, sistem informasi komunikasi, serta monitoring. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor termasuk kreditur, terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat (Chandra & Keni, 2019)

Secara sederhana, *good corporate governance* diperlukan untuk

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan atau korporasi. Dengan penerapan *good corporate governance*, diharapkan perusahaan atau korporasi dapat mencapai *sustainability* dengan memperhatikan para *stakeholder*. Dengan *good corporate governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal dan efisien. Selain itu, akan berpengaruh positif pula terhadap kinerja perusahaan (Sanarta, 2024)

Dengan demikian secara teoretis, praktik *good corporate governance* dapat kinerja dan mengurangi tingkat risiko sebuah entitas meningkatkan kepercayaan stakeholders (Dedi, 2021)

Berdasarkan fenomena menyebutkan bahwa kinerja instansi pemerintah di Dinas Sosial Kota Cirebon belum berhasil meraih mencapai kinerja yang maksimal, maka peneliti untuk mengkaji lebih dalam, sehingga dapat mengetahui apakah faktor faktor pendukung, seperti peran auditor dalam mengaudit kinerja dan implementasi *Good Corporate Governance* di Instansi tersebut benar-benar berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kinerja di Instansi tersebut, dan kedepannya bisa menjadi contoh kepada instansi lain untuk mencapai kinerja yang baik sesuai visi dan misi instansi, dengan hasil audit kinerja . Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai **PENGARUH AUDIT KINERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI STUDY KASUS DINAS SOSIAL KOTA CIREBON**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

- 1) Pengaruh audit kinerja dan implementasi *Good corporate governance* terhadap kinerja instansi
- 2) Faktor-faktor kinerja di Dinas sosial Kota Cirebon

#### **b. Pendekatan Penelitian**

- 1) Menggunakan pendekatan kuantitatif

- 2) Menggunakan analisis data dengan uji instrument yaitu uji validitas dan uji reabilitas dan pengambilan kesimpulan

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh audit kinerja dan implementasi *Good corporate governance* terhadap kinerja instansi (Studi kasus pada Dinas sosial kota Cirebon)

## 2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diungkapkan untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian membatasi masalah pada audit kinerja, Implementasi *good corporate governance* dan kinerja instansi pada Dinas Sosial kota Cirebon

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut

- a. Bagaimana pengaruh audit kinerja terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah?
- b. Bagaimana pengaruh audit kinerja terhadap penerapan *Good corporate governance*?
- c. Bagaimana pengaruh audit kinerja dan penerapan *Good corporate governance* terhadap kinerja instansi pemerintah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit kinerja terhadap peningkatan kinerja di dinas sosial Kota Cirebon
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit kinerja terhadap penerapan *Good corporate governance* di dinas sosial Kota Cirebon
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit kinerja dan penerapan

*Good corporate governance* terhadap kinerja di dinas sosial Kota Cirebon

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
- 2) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang sektor publik
- 3) Memberikan tambahan informasi kepada penelitian sektor publik khususnya mengenai variabel Audit kinerja, *Good corporate governance*
- 4) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagaimana sebuah audit kinerja dan penerapan *good corporate governance* yang baik serta pemahaman lebih mendalam dari teori yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.

#### 2) Bagi Dinas Sosial Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi dinas sosial dalam mencapai peningkatan kinerja yang maksimal

#### 3) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Penelitian ini sebagai implementasi dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah

wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan yang ada dibidang  
macam-macam khususnya pada jurusan Akuntansi Syariah

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya

1. **BAB I PENDAHULUAN** : Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis.
3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN** : Dalam bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data.
4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** : Dalam bab ini menguraikan tentang Kondisi Objek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian.
5. **BAB V PENUTUP** : Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.